

Peran Internet dalam Meningkatkan Pembangunan Demokrasi di Kawasan Barat Indonesia

The Role of the Internet in Improving Democratic Development in Western Indonesia

Dyah Makutaning Dewi*, Dewi Widyawati**

*Badan Pusat Statistik, **Badan Pusat Statistik

email: *dyahfriendly@gmail.com, **dewiwidyawati2408@gmail.com

Riwayat Artikel	Abstract
Diterima: 31 Januari 2021 Direvisi: 5 April 2021 Disetujui: 22 April 2021 doi: 10.22212/jp.v12i1.2029	<p><i>Guaranteed freedom of the press has become an absolute requirement for democratization in Indonesia. Following the 1998 Reform in Indonesia, the press is no longer under the pressure and control of the state. The Indonesia Democracy Index is an index that describes the dynamics of democracy in Indonesia. The developing democratization is further supported by massive development in technology and information. In describing the level of development of information and communication technology, an index is used as a standard measure for information and communication technology development in an area called the Information and Communication Technology Development Index. Of the 11 indicators that make up the index, the fastest growing indicator is the percentage of households with internet access. The availability of internet as a medium of information and communication has encouraged the public to voice their aspirations through different online platforms. The research employs multiple linear regression method. The data used is sourced from Statistics Indonesia and cover 17 provinces in the Western Region of Indonesia. The results showed that the percentage of households accessing the internet and the percentage of poor people had a positive and significant effect on the Indonesian Democracy Index in western Indonesia. Supported by efforts such as improving the development of infrastructure, training, and other measures, it would be on the government's best interest to work with different parties to support and increase the number of internet users. Moreover, more public education on the importance of democracy is also necessary to ensure higher public participation in democracy.</i></p> <p><i>Keywords: Indonesia Democracy Index; Internet; Western Indonesia</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Jaminan terhadap kebebasan pers telah menjadi syarat mutlak bagi upaya demokratisasi di Indonesia. Setelah terjadinya reformasi di Indonesia pada tahun 1998, tidak terjadi lagi tekanan dan pengendalian oleh negara terhadap pers. Indeks Demokrasi Indonesia merupakan suatu indeks yang menggambarkan dinamika demokrasi di wilayah Indonesia. Demokratisasi yang semakin berkembang ini didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang masif. Dalam menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, terdapat suatu indeks sebagai ukuran standar pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi di suatu wilayah yang dinamakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dari 11 indikator penyusun indeks tersebut, indikator yang berkembang pesat yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses internet. Adanya internet yang merupakan media informasi dan komunikasi, mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui media internet. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda. Data yang digunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik meliputi 17 provinsi di Kawasan Barat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan persentase rumah tangga yang mengakses internet dan persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Demokrasi Indonesia di Kawasan Barat Indonesia. Melalui berbagai langkah seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan sebagainya, sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung dan meningkatkan pengguna internet. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai demokrasi sehingga masyarakat turut aktif dalam berdemokrasi di negeri ini.</p> <p><i>Kata Kunci: Indeks Demokrasi Indonesia; Internet; Kawasan Barat Indonesia</i></p>

Pendahuluan

Pada masa pemerintahan Orde Baru, kebebasan mengungkapkan pendapat tidak bisa dilakukan secara bebas. Pada masa itu, media massa dan pers dikendalikan dan dikontrol oleh kekuasaan pemerintah. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meredam setiap potensi konflik politik yang dapat mengancam suksesnya pembangunan ekonomi. Begitu besarnya kontrol pemerintah terhadap media massa pada saat orde baru tersebut mengakibatkan pers tidak dapat memberikan informasi yang akurat dan terbuka (*transparency*) kepada masyarakat, media tidak dapat mengkritik kebijakan pemerintah yang menyimpang yang akhirnya banyak terjadi penyimpangan yang dilakukan pemerintah ketika media massa tidak bebas untuk menyampaikan informasi maka pengetahuan masyarakat tentang informasi yang sebenarnya termarginalisasikan¹.

Setelah reformasi pada tahun 1998, tidak lagi terjadi tekanan dan pengendalian oleh negara terhadap pers. Masyarakat memiliki kebebasan berpendapat yang diaktualisasikan melalui media massa. Media massa diberi ruang yang bebas dalam menjalankan peran dan fungsi persnya sehingga dengan adanya kebebasan berkomunikasi dan berekspresi akan menghasilkan informasi yang benar dan transparan, serta tidak menimbulkan *pressure* dan orang dipenjara karena perbedaan pendapat². Hal ini memberikan angin segar terhadap majunya perkembangan demokrasi di Indonesia.

Sejalan dengan demokratisasi yang dicapai Indonesia, perkembangan demokrasi perlu dipantau dari masa ke masa untuk menentukan wilayah prioritas dalam pembangunan politik di Indonesia. Mengingat

pentingnya hal tersebut, diperlukan suatu indikator yang menggambarkan bagaimana perkembangan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) didukung oleh Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan Kemenkopolkham, pada tahun 2009 mengembangkan alat ukur untuk menilai kemajuan demokrasi yang disebut dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan suatu indeks yang menggambarkan dinamika demokrasi di Indonesia. IDI tersusun atas tiga aspek penting, yaitu Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi dimana tiap aspek tersebut tersusun atas berbagai indikator³. Menurut Koordinator Residen PBB Indonesia El-Mostula Benlamlah, IDI menyediakan data penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya terkait penilaian terhadap demokrasi di tingkat provinsi untuk memastikan keselarasan antara *good governace* dengan tujuan reformasi demokratis. Data tersebut dapat digunakan oleh pemerintah serta otoritas lokal sebagai alat merumuskan kebijakan dan melakukan *evidence-based analysis* agar dapat menentukan bidang sasaran yang spesifik untuk diintervensi maupun untuk berbagi pengalaman atau praktik terbaik guna semakin mengukuhkan demokrasi di Indonesia⁴.

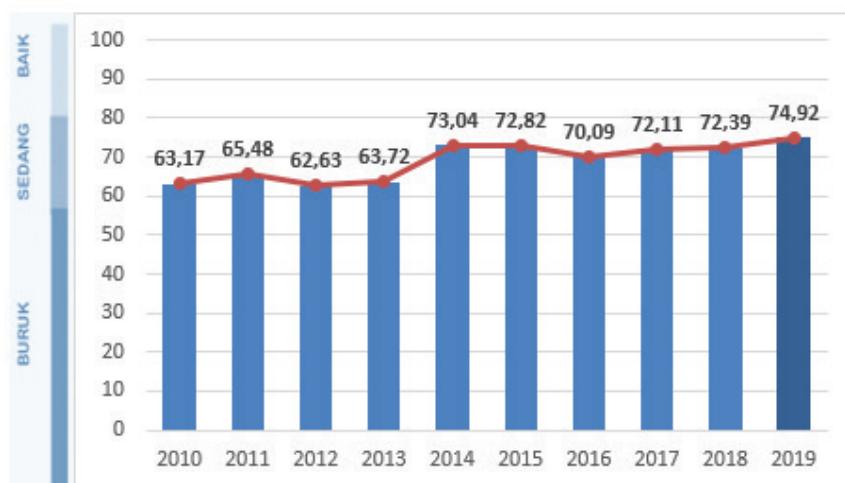
Perkembangan demokrasi di Indonesia yang digambarkan dengan IDI, dapat dilihat pada Gambar 1. Pada tahun 2010-2013, IDI berfluktuasi di kisaran angka 60-an, sementara pada periode 2014-2019 di kisaran angka 70-an. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni "baik" (indeks > 80), "sedang" (indeks 60-80), dan "buruk" (indeks < 60). Hal ini menunjukkan walaupun IDI tingkat nasional masih pada

1 Jambur Poti, "Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan," *Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 17-29, <http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last.23-35.pdf>.

2 Poti, "Demokratisasi Media Massa," 17-29.

3 Maswadi Rauf, dkk, *Menakar Demokrasi di Indonesia* (Jakarta: United Nations Development Programme, Indonesia, 2011), <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2009.pdf>.

4 Rauf, dkk, *Menakar Demokrasi di Indonesia*.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Gambar 1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2010-2019

kategori “sedang”, namun telah mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan enam tahun yang lalu yang menunjukkan tingkat demokrasi yang semakin membaik.

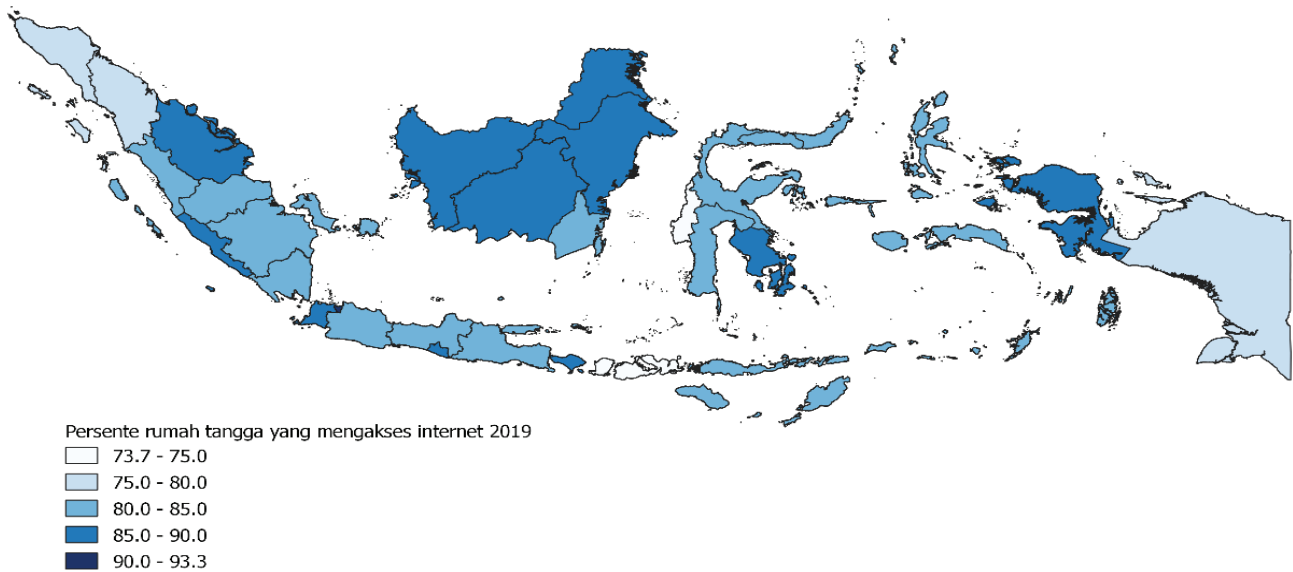
Demokratisasi yang semakin berkembang ini didukung dengan perkembangan teknologi dan informasi yang masif. Dalam menggambarkan tingkat pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terdapat suatu indeks sebagai ukuran standar pembangunan TIK di suatu wilayah yang dinamakan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK). IP-TIK dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik yang bertujuan untuk mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur *gap* atau kesenjangan digital antarwilayah, serta untuk mengukur potensi pembangunan TIK di Indonesia. IP-TIK Indonesia pada tahun 2019 berada pada angka 5,32⁵. Provinsi dengan IP-TIK tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (IP-TIK 7,31) sedangkan provinsi dengan IP-TIK terendah adalah Provinsi Papua (IP-TIK 3,98). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan TIK antara kawasan barat dengan kawasan timur Indonesia.

IP-TIK tersusun atas 11 indikator yang terbagi dalam tiga sub indeks, yaitu Subindeks

Akses dan Infrastruktur, Subindeks Penggunaan, dan Subindeks Keahlian. Dari 11 indikator penyusun IP-TIK, indikator yang berkembang pesat yaitu persentase rumah tangga yang memiliki akses internet dan indikator tersebut masuk ke dalam subindeks Penggunaan. Kawasan pembangunan Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). KBI terdiri atas Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Bali, sedangkan KTI terdiri atas Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, dan Pulau Papua. Pembangunan TIK dilihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses internet di KBI relatif lebih tinggi dibandingkan di KTI yang ditunjukkan dengan Gambar 2. Pada tahun 2019, Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan persentase rumah tangga pengguna internet tertinggi di Indonesia yang mencapai angka 93,3 persen. Hal ini diperkuat oleh hasil Survei Penggunaan TIK di DKI Jakarta yang menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen masyarakat mengakses internet lebih dari 5 jam dalam sehari, dimana aktivitas mengakses internet masyarakat didominasi oleh *chatting* dan bersosial media⁶. Adapun provinsi dengan

⁵ Badan Pusat Statistik, *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*. (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020).

⁶ Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, *Survei Penggunaan TIK di DKI Jakarta 2019* (Jakarta: Dinas



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 2. Persentase Rumah Tangga yang pernah Mengakses Internet 3 Bulan Terakhir di Indonesia tahun 2019

persentase rumah tangga yang mengakses internetnya relatif masih rendah terdapat di Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Papua.

Tak dapat dipungkiri bahwa internet menjadi kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Adanya internet yang merupakan media informasi dan komunikasi mendorong masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya melalui media internet. Perkembangan internet yang cukup cepat diikuti oleh semakin bertambahnya pengguna internet di Indonesia. Internet telah membantu meningkatkan transparansi dalam mengawasi kinerja pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis⁷. Hal ini tercermin dari gencarnya aktivitas masyarakat dalam menggunakan media sosial maupun platform lainnya untuk memberikan gagasan, saran, maupun kritikan atas fenomena atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019).

7 Damar Juniarto, "Mempertimbangkan Internet Dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia," 2016, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1085-mempertimbangkan-internet-dalam-gerakan-demokrasi-di-indonesia>.

Selain itu, internet menjadi salah satu sarana untuk melancarkan kampanye politik untuk memperoleh dukungan dari masyarakat secara luas. Internet merupakan media yang banyak digunakan untuk promosi tokoh politik maupun partai politik dengan memanfaatkan semua media yang dianggap potensial dalam meningkatkan popularitas dari tokoh politik maupun partai politik tersebut serta untuk mendapatkan dukungan sebanyak-banyaknya⁸.

Sejalan dengan hal tersebut, internet dirancang sebagai metode komunikasi sebagai metode komunikasi untuk menggerakkan suatu masyarakat. Hal tersebut diperkuat dengan keberadaan ratusan jaringan komunitas, kelompok aksi politik, dan organisasi internasional yang sangat terorganisir untuk mendorong *netizen* untuk secara aktif terlibat dalam pengawasan dan partisipasi pemerintah⁹. Oleh karena itu, internet dimanfaatkan oleh berbagai pihak untuk melancarkan berbagai tujuan politik tertentu.

8 James R Situmorang, "Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya," *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2012): 77-91, <https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418>.

9 C.C.Gotlieb, "Does the Internet Promote Democracy?," 2002, 21-29, https://doi.org/10.1007/978-0-387-35609-9_2.

Adanya perkembangan teknologi dan informasi tersebut tentunya berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, sangat menarik dilakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Internet dalam memengaruhi pembangunan demokrasi di KBI pada tahun 2019.

KBI dipilih sebagai lokus penelitian hal ini dikarenakan persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet di kawasan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan KTI. Hal tersebut dikarenakan infrastruktur di KBI dapat mendukung terjadinya peningkatan pengguna internet serta adanya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Selain itu, berdasarkan data BPS pada tahun 2019 sebagian besar provinsi di KBI memiliki IDI yang lebih tinggi dibandingkan provinsi-provinsi yang berada di KTI. Dalam mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia terutama di KBI sangat penting adanya peran internet.

Kerangka Teori

Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. IDI merupakan akumulasi dari nilai indeks tiga aspek demokrasi yang dianggap penting, yaitu aspek Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-hak Politik (*Political Rights*) dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek tersebut yang dijabarkan menjadi 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Adapun, komponen penghitungan IDI 2010-2019 ditunjukkan oleh Tabel 1.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1)

Tabel 1. Komponen Penghitungan IDI 2009-2019

Aspek	Variabel	Indikator
Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	2 indikator
	2. Kebebasan Berpendapat	2 indikator
	3. Kebebasan Berkeyakinan	3 indikator
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	3 indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	5 indikator
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	2 indikator
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	2 indikator
	8. Peran DPRD	3 indikator
	9. Peran Partai Politik	2 indikator
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	2 indikator
	11. Peradilan yang Independen	2 indikator

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

review surat kabar lokal; (2) *review* dokumen (Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan lain-lain); (3) *Focus Group Discussion* (FGD); dan (4) wawancara mendalam. Tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60-80), dan “buruk” (indeks < 60)¹⁰. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, IDI juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik,

¹⁰ Maswadi Rauf, dkk, *Menakar Demokrasi di Indonesia*.

lembaga peradilan, dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat karena keduanya dipandang sebagai aktor penting yang turut menentukan performa demokrasi.

Hubungan Demokrasi dengan Kebebasan

Demokrasi sebagai nilai dibangun di atas tiga pilar, dimana pilar pertama adalah kebebasan. Demokrasi harus didukung oleh kebebasan individu dalam mengekspresikan gagasan dan kreativitasnya. Karena demokrasi menuntut kebebasan berpendapat, maka tidak akan ada sensor terhadap pendapat¹¹. Tentunya, kebebasan dalam mengungkapkan pendapat dan gagasan ini tidak dapat dilakukan sebebaskan-bebasnya. Kebebasan yang dimaksud adalah bebas yang bertanggungjawab. Bebas yang bertanggung jawab adalah kebebasan untuk mengekspresikan dirinya dengan tidak mengganggu orang lain¹².

Dalam pengertian poliarki, demokrasi adalah sebuah sistem pemerintahan dengan ciri-ciri adanya kebebasan warga negara untuk membentuk dan ikut serta dalam organisasi, berekspresi atau berpendapat, menjadi pejabat publik, melakukan persaingan atau kontestasi di antara warga untuk mendapatkan dukungan dalam rangka memperebutkan jabatan-jabatan publik penting, memberikan suara dalam pemilihan umum, ada pemilihan umum yang jujur, adanya sumber-sumber informasi alternatif di luar yang diberikan pemerintah, dan adanya jaminan kelembagaan bahwa setiap kebijakan pemerintah tergantung pada dukungan suara dan bentuk-bentuk ekspresi keinginan lainnya, dan karena itu harus ada jaminan pemilihan umum secara periodik sehingga setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah terbuka untuk dievaluasi dan

11 Harjono, "Negara Hukum, Demokrasi Dan Makamah Konstitusi," *Inovatif | Jurnal Ilmu Hukum*, 2010, https://doi.org/10.1007/978-1-137-07249-8_8.

12 Gadug Kurniawan, "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi," *Inovatif VIII*, no. 2 (2015): 95-114.

dipertanggung jawabkan dalam pemilihan umum tersebut¹³. Sejalan dengan hal tersebut, demokratisasi sangat berkaitan dengan kebebasan berkarya dan berekspresi individu dalam ruang *civil society*, termasuk di dalamnya, antara lain kebebasan untuk berkomunikasi, kebebasan berpikir dan beragama kebebasan untuk berpendapat dan berasosiasi serta kebebasan untuk memiliki dan mengatur kepemilikannya¹⁴.

Betapa pentingnya kebebasan ini dalam tradisi demokrasi liberal sangat terasa misalnya dalam penilaian *Freedom House* yang mengategorikan negara-negara di dunia ini hanya dalam kategori bebas atau tidak bebas. Dalam hal ini seluruh prosedur demokrasi bermuara pada satu hal, yaitu menjamin adanya kebebasan¹⁵. Dari penjelasan tersebut membuktikan bahwa ada keterkaitan yang erat antara kebebasan dan demokrasi.

Hubungan Demokrasi dengan Internet

Pada era digital, masyarakat tidak terpisahkan dengan media komunikasi dan pertukaran informasi yaitu internet. Internet mendorong berkembangnya demokratisasi di Indonesia. Internet telah membantu meningkatkan transparansi dalam mengawasi kinerja pemerintahan, memberi akses pada informasi, dan juga memfasilitasi warga untuk berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis¹⁶. Kehadiran internet membuat berbagai informasi politik, sosialisasi politik, kampanye politik, hingga protes politik dapat dipublikasikan dan dipertukarkan dengan waktu yang lebih

13 Robert A Dahl, *Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1997).

14 Poti, "Demokratisasi Media Massa," 17-29.

15 Maswadi Rauf, dkk, *Menakar Demokrasi di Indonesia*.

16 Damar Juniarto, "Mempertimbangkan Internet Dalam Gerakan Demokrasi Di Indonesia," 2016, <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1085-mempertimbangkan-internet-dalam-gerakan-demokrasi-di-indonesia>.

cepat. Selain itu, kemampuan Internet dalam membangun komunikasi dua arah menjadikan partisipasi politik tidak harus hadir secara fisik dalam debat terbuka politisi atau demonstrasi di jalan¹⁷.

Internet atau media digital memiliki potensi untuk meningkatkan komunikasi publik dan memperkaya demokrasi¹⁸. Internet di tangan sekelompok kecil aktivis yang memiliki komitmen terhadap demokratisasi telah dijadikan sebuah media komunikasi yang relatif aman dari sensor, untuk mereka berkomunikasi dengan kelompok mereka ataupun dengan kelompok-kelompok lain, baik di dalam maupun di luar negeri¹⁹.

Internet diharapkan dapat memperluas partisipasi politik di tingkat akar rumput dan memperkuat komunitas politik lokal, hal ini didukung oleh fakta bahwa internet menciptakan persamaan derajat sehingga semua orang bisa memberikan kontribusi dalam diskusi *online*²⁰. Ruang alternatif ini digunakan oleh pengguna Internet di Indonesia untuk mendiskusikan isu-isu politik yang tak mungkin muncul dalam percakapan *offline*²¹. Munculnya sosial media, seperti *Twitter*, *Facebook*, *Instagram*, *YouTube*, dan lain-lain membuat partisipasi masyarakat untuk ikut andil dalam memberikan gagasannya melalui sosial media tersebut semakin pesat. Para teoretisi demokrasi selama ini percaya bahwa demokrasi dapat terpelihara karena ada

partisipasi politik warga negara yang aktif dan peduli terhadap masalah-masalah kewargaan (*civic affairs*)²².

Metode Penelitian

Data yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019. Data-data yang digunakan meliputi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), persentase rumah tangga yang mengakses internet, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Struktur data yang digunakan merupakan data *cross section* sejumlah 17 provinsi di Kawasan Barat Indonesia (KBI) tahun 2019.

Definisi Operasional

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit untuk menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
- Persentase rumah tangga yang mengakses internet merupakan persentase rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam tiga bulan terakhir.
- Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan yang formal.
- Pendapatan per kapita merupakan nilai PDRB yang dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu. Pada penelitian ini menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga konstan dengan satuan ribu rupiah.

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif dan analisis inferensia. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan IDI dan persentase rumah tangga yang mengakses

17 Zainal Fatah and Megasari Noer Fatanti, "Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net Dalam Praktik Demokrasi Digital Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 3, no. 1 (2019): 306, <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1459>.

18 Stephen Coleman; Jay G Blumler, *The Internet and Democratic Citizenship; Theory, Practice and Policy* (New York: Cambridge University Press, 2004).

19 Salim Alatas, "Media Baru, Partisipasi Politik Dan Kualitas Demokrasi," 2014.

20 Reny Yuliati, "Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi," *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 2, no. 02 (2017): 124-29, <https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.840>.

21 Fatah and Fatanti, "Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net Dalam Praktik Demokrasi Digital Di Indonesia."

22 Alatas, "Media Baru, Partisipasi Politik dan Kualitas Demokrasi."

internet pada tahun 2019 serta variabel lainnya dengan menggunakan peta tematik.

Adapun analisis inferensia yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Model regresi linear berganda merupakan persamaan yang menyatakan hubungan antara lebih dari satu variabel prediktor dan satu variabel respon yang digambarkan dalam suatu garis lurus. Adapun, model regresi linear berganda (First Order Multiple Linear Regression Model) dapat dituliskan:

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \dots + \beta_p X_{ip} + \varepsilon_i \quad (1)$$

Keterangan:

y_i = variabel tak bebas (response)

X_i = variabel bebas ke- i (predictor)

ε_i = suku sisaan (error)

β_i = parameter model regresi dari variabel bebas ke- i

Dalam mendapatkan estimasi parameter model regresi digunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Prinsip dari metode OLS adalah meminimalkan jumlah kuadrat penyimpangan nilai-nilai observasi y_i terhadap rata-ratanya (meminimalkan jumlah kuadrat error).

$$\min \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2)$$

Model regresi linear berganda yang menggunakan menggunakan metode estimasi OLS, membutuhkan asumsi-asumsi yang harus dipenuhi agar estimasi yang dihasilkan bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Asumsi tersebut dikenal dengan asumsi klasik, diantaranya yaitu:

1. HOMOSKEDASTISITAS

Salah satu asumsi penting dari model regresi linear klasik adalah faktor gangguan bersifat homoskedastik atau memiliki varians untuk setiap nilai yang sama atau konstan, yaitu sama dengan Adapun hipotesis yang biasa digunakan pada uji

asumsi homoskedastisitas adalah:

$$H_0: \text{Var}(\varepsilon_i | X_i) = \sigma^2$$

(Terjadi Homoskedastisitas)

$$H_1: \text{Var}(\varepsilon_i | X_i) \neq \sigma^2$$

(Terjadi Heteroskedastisitas)

Statistik Uji yang dapat digunakan Uji Park, Uji White, Uji Breusch-Pagan, Uji Glejser dan Uji Goldfeld-Quant.

Gagal tolak H_0 jika $p\text{-value} > \alpha$

2. NORMALITAS

Asumsi Normalitas adalah residual yang dibentuk model regresi linear terdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians.

Uji hipotesis:

$$H_0: \varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

(error berdistribusi normal)

$$H_1: \varepsilon_i \not\sim N(0, \sigma^2)$$

(error tidak berdistribusi normal)

Statistik Uji yang dapat digunakan Kolmogorov Smirnov, Liliefors, Jarque-Berra.

Gagal tolak H_0 jika $p\text{-value} > \alpha$

3. NON-MULTIKOLINEARITAS

Asumsi Non Multikolinearitas adalah asumsi yang menyatakan tidak adanya hubungan linear yang diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan model regresi. Untuk hipotesis pada uji asumsi ini adalah:

H_0 : Tidak terjadi Multikolinearitas pada variabel-variabel bebas

H_1 : Terjadi Multikolinearitas pada variabel-variabel bebas

Kita dapat melakukan pengujian asumsi non-multikolinearitas dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*). Apabila nilai VIF > 10 , mengindikasikan adanya multikolinearitas²³.

Analisis inferensia bertujuan untuk mengetahui pengaruh persentase rumah

²³ John Neter, Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim, William Wasserman., *Applied Linear Statistical Models* (McGraw: Hill/Irwin series Operations and decision sciences, 1996).

tangga yang mengakses internet serta variabel-variabel lainnya terhadap IDI di KBI. Data yang digunakan terdiri dari 17 provinsi di KBI meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, dan Bali pada tahun 2019.

Adapun model yang digunakan di dalam penelitian ini dapat ditulis sebagai berikut:

$$IDI_i = \alpha + INT_i + PMK_i + RLS_i + lnPP_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

keterangan:

i = 1, 2, 3, ..., N provinsi di KBI

α = *Intersep*

IDI = Indeks Demokrasi Indonesia provinsi di KBI

INT = Persentase rumah tangga yang mengakses internet provinsi di KBI

PMK = Persentase penduduk miskin provinsi di KBI

RLS = Rata-rata lama sekolah provinsi di KBI

PP = Pendapatan Per Kapita provinsi di KBI

Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam menggunakan regresi linear berganda yaitu:

1. Menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas di dalam penelitian.

Pada penelitian ini variabel bebas yang digunakan meliputi persentase rumah tangga yang mengakses internet, persentase

penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Adapun variabel tidak bebas yang digunakan yaitu Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

2. Melakukan uji asumsi klasik

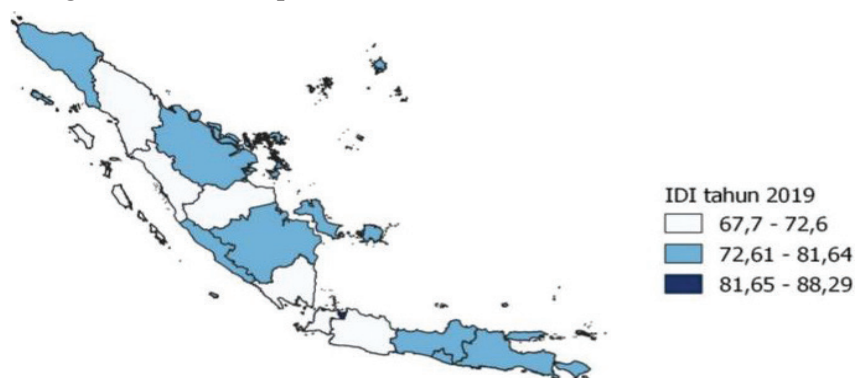
Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan meliputi uji normalitas, uji homoskedastisitas, dan uji non-multikolinearitas.

3. Melakukan uji keberartian model.

Gambaran Umum Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dan Variabel-Variabel Lainnya

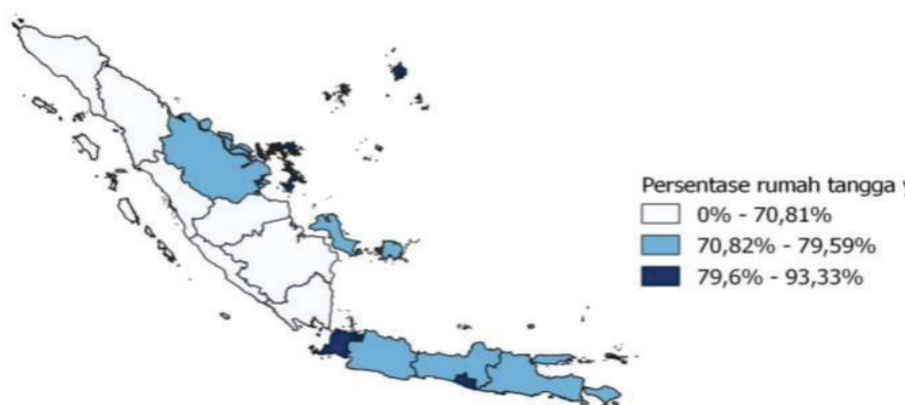
Pada Gambar 3 menunjukkan Indeks Demokrasi Indonesia di Kawasan Barat Indonesia (KBI) yang disajikan pada peta tematik. Wilayah yang berwarna biru gelap menunjukkan wilayah yang memiliki IDI yang tinggi. Adapun wilayah yang berwarna biru terang menunjukkan wilayah yang memiliki IDI yang rendah.

Pada tahun 2019, provinsi di KBI yang memiliki IDI tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar 88,29. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, apabila dilihat dari ketiga aspek yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi secara berturut-turut sebesar 91,01; 83,86; 91,89. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan demokrasi di Provinsi DKI Jakarta telah matang. Hal ini dikarenakan pemerintah



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 3. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Tahun 2019



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 4. Persentase Rumah Tangga yang Mengakses Internet di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Tahun 2019

di provinsi tersebut berupaya menjaga faktor penting di dalam demokrasi, salah satunya adalah kebebasan berbicara atau berpendapat sehingga dapat mengimplementasikan proses demokrasi dengan cara yang baik²⁴.

Adapun provinsi yang memiliki IDI terendah di KBI pada tahun 2019 yaitu berada di Provinsi Sumatera Utara dengan nilai sebesar 67,65. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, apabila dilihat dari ketiga aspek yaitu aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik, dan aspek lembaga demokrasi secara berturut-turut sebesar 72,54; 61,59; 71,12. Pada tahun 2019, aspek kebebasan sipil turun 4 poin dari tahun 2018. Hal ini dikarenakan menurunnya variabel kebebasan berpendapat sebesar 35,42 poin dari 52,77 pada tahun 2018 dan menjadi 17,35 pada tahun 2019. Kemudian, nilai variabel kebebasan berkumpul dan berserikat mengalami penurunan sebesar 20,31 poin dari 87,5 pada tahun 2018 dan menjadi 67,19 pada tahun 2019. Adapun kinerja indikator dengan kategori buruk (skor di bawah 60) pada tahun 2019 sebanyak 7 indikator yaitu ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, ancaman/penggunaan kekerasan

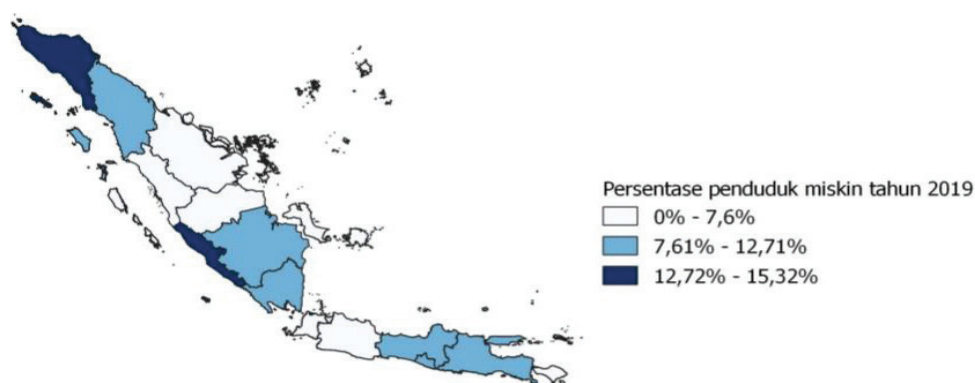
oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat, persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD provinsi, demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan, alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan, rekomendasi DPRD kepada eksekutif, serta upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah²⁵).

Pada Gambar 4 menunjukkan persentase rumah tangga yang mengakses internet di KBI yang disajikan pada peta tematik. Wilayah yang berwarna biru gelap menunjukkan wilayah dengan persentase rumah tangga yang mengakses internet yang tinggi. Adapun wilayah yang berwarna biru terang menunjukkan wilayah dengan persentase rumah tangga yang mengakses internet yang rendah.

Pada tahun 2019, provinsi di KBI dengan persentase rumah tangga yang mengakses internet tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase sebesar 93,33 persen. DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat penetrasi yang tinggi. Hal ini dikarenakan provinsi tersebut memiliki pembangunan jaringan telekomunikasi yang

24 CNN Indonesia, "Raih Indeks Tertinggi, Anies Anggap Demokrasi Di DKI Matang," 2018, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213132746-32-353373/raih-indeks-tertinggi-anies-anggap-demokrasi-di-dki-matang>.

25 Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2019 Naik 3,32 Poin," 2020, <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/730/indeks-demokrasi-indonesia-idi-sumatera-utara-2019-naik-3-32-poin.html>.



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 5 . Persentase Penduduk Miskin di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Tahun 2019

telah matang²⁶. Oleh karena itu, sangat mudah apabila masyarakat ingin mengakses internet sehingga dapat menjalani berbagai aspek kehidupan dengan mudah.

Adapun provinsi dengan persentase rumah tangga yang mengakses internet terendah di KBI pada tahun 2019 yaitu berada di Provinsi Aceh dengan persentase sebesar 65,16 persen. Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat penetrasi yang rendah. Setengah atau lebih penduduk di provinsi tersebut belum pernah mengakses dunia maya²⁷ Selain itu, masih minimnya jumlah dan kualitas dari sarana prasana infrastruktur dasar seperti telekomunikasi.

Pada Gambar 5 menunjukkan persentase penduduk miskin di KBI yang disajikan pada peta tematik. Wilayah yang berwarna biru gelap menunjukkan wilayah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi. Adapun wilayah yang berwarna biru terang menunjukkan wilayah dengan persentase penduduk miskin yang rendah.

Pada tahun 2019, provinsi di KBI dengan persentase penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Aceh. Berdasarkan data Susenas pada Maret tahun 2019 mayoritas penduduk miskin di Aceh bekerja di sektor pertanian. Apabila dilihat dari aspek pendidikan,

penduduk miskin yang bekerja mayoritas berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat ke bawah yaitu sebesar 46,29 persen. Selain itu, mayoritas penduduk miskin di Aceh tinggal di daerah perdesaan²⁸.

Adapun provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di KBI pada tahun 2019 yaitu berada di Provinsi DKI Jakarta. DKI Jakarta merupakan provinsi yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian sehingga dapat dijadikan cerminan keberhasilan pembangunan nasional, misalnya dari aspek tingkat kemiskinan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki target tingkat kemiskinan di provinsi tersebut turun sebesar 1 persen pada tahun 2022²⁹.

Pada Gambar 6 menunjukkan rata-rata lama sekolah di KBI yang disajikan pada peta tematik. Wilayah yang berwarna biru gelap menunjukkan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang tinggi. Adapun wilayah yang berwarna biru terang menunjukkan wilayah dengan rata-rata lama sekolah yang rendah.

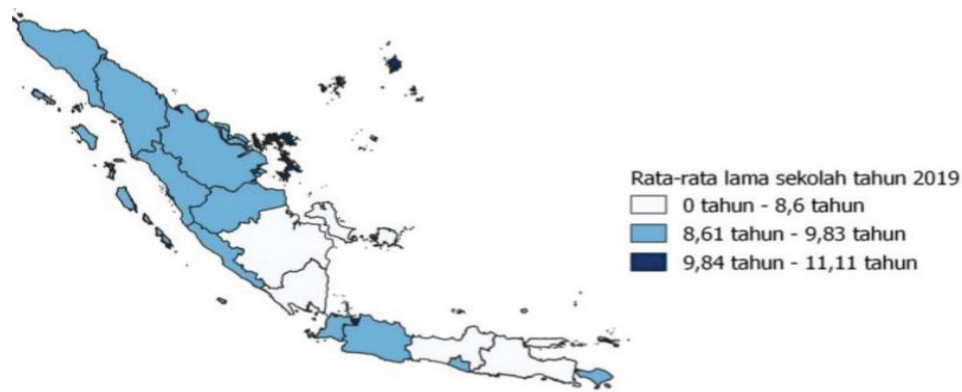
Pada tahun 2019, provinsi di KBI dengan rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah selama

26 Leo Dwi Jatmiko, "Setengah Penduduk Di Provinsi Ini Buta Internet - Teknologi Bisnis.Com," 2019, <https://teknologi.bisnis.com/read/20190521/101/925206/setengah-penduduk-di-provinsi-ini-buta-internet>.

27 Jatmiko, "Setengah Penduduk di Provinsi ini Buta Internet."

28 Nuri Taufiq, "Fakta-Fakta Seputar Aceh Sebagai Provinsi Termiskin di Sumatera," 2020, <https://news.detik.com/kolom/d-4877496/fakta-fakta-seputar-aceh-sebagai-provinsi-termiskin-di-sumatera>.

29 Khoirun Nisa, "Persentase Penduduk Miskin Di Provinsi DKI Jakarta Menurun," 2019, <http://statistik.jakarta.go.id/persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-dki-jakarta-menurun/>.



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 6. Rata-Rata Lama Sekolah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Tahun 2019

11,11 tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, selama periode tahun 2015 hingga 2019, rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat memiliki kesempatan dalam memperoleh pelayanan pendidikan. Selain itu, sebagian besar masyarakat telah menyadari pentingnya pendidikan. Hal tersebut didukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menginisiasi dan mendorong program “Sekolah Berkualitas dan Tuntas 100 Persen”. Hal tersebut bertujuan supaya seluruh anak di provinsi tersebut memperoleh pendidikan yang berkualitas hingga tuntas. Selain itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan pelayanan transportasi sehingga memudahkan anak dalam menempuh pendidikan³⁰.

Adapun provinsi dengan rata-rata lama sekolah terendah di KBI pada tahun 2019 yaitu berada di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan provinsi memiliki rata-rata lama sekolah selama 8,03 tahun. Permasalahan ketimpangan dalam aspek pendidikan baik sarana maupun kualitas masih terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, permasalahan anggaran antara sekolah negeri dan sekolah swasta juga masih ditemukan³¹.

30 Yohanes Enggar Harususilo, “Anies Dorong Program ‘Pendidikan Berkualitas Dan Tuntas 100 Persen,’” 2019, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/19/18472651/anies-dorong-program-pendidikan-berkualitas-dan-tuntas-100-persen>.

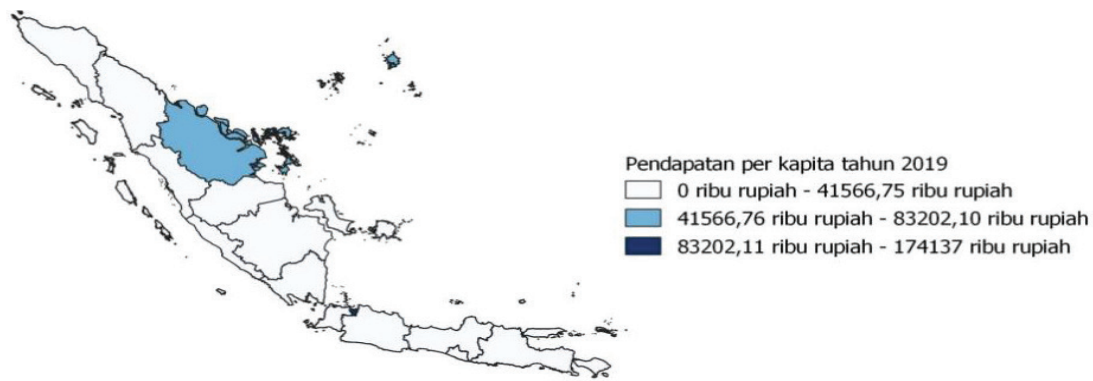
31 Radarsemarang.jawapos.com, “Anggaran Pendidikan Masih Timpang,” 2019, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/09/11/anggaran-pendidikan-masih-timpang/>.

Pada Gambar 7 menunjukkan pendapatan per kapita di KBI yang disajikan pada peta tematik. Wilayah yang berwarna biru gelap menunjukkan wilayah dengan pendapatan per kapita yang tinggi. Adapun wilayah yang berwarna biru terang menunjukkan wilayah dengan pendapatan per kapita yang rendah.

Pada tahun 2019, provinsi di KBI dengan pendapatan per kapita tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai sebesar Rp. 174136,56 ribu rupiah. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah yang menjadi pusat perekonomian dan ditunjukkan dengan banyaknya jenis pekerjaan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, banyak masyarakat luar daerah yang merantau di Provinsi DKI Jakarta untuk bekerja. Sebagai pusat perekonomian, Provinsi DKI Jakarta sering mendapatkan surplus usaha yang besar dari luar wilayah baik di luar provinsi maupun luar negeri.

Adapun provinsi dengan pendapatan per kapita terendah di KBI pada tahun 2019 yaitu berada di Provinsi Bengkulu dengan nilai sebesar Rp. 23276,15 ribu rupiah. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang penyerapan tenaga kerjanya masih didominasi oleh penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah yakni tamatan Sekolah Dasar (SD) ke bawah. Selain itu, Pada tahun 2019, kondisi perekonomian di

[jawapos.com/berita/semarang/2019/09/11/anggaran-pendidikan-masih-timpang/](https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/09/11/anggaran-pendidikan-masih-timpang/).



Sumber: Hasil Pengolahan

Gambar 7. Pendapatan Per Kapita di Kawasan Barat Indonesia (KBI) Tahun 2019

Provinsi Bengkulu mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen (yoy). Nilai tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan tahun 2018 yang memiliki pertumbuhan sebesar 4,99 persen (yoy). Hal tersebut dikarenakan melambatnya konsumsi rumah tangga yang disebabkan oleh penurunan pendapatan masyarakat. Selain itu, kinerja investasi lebih rendah yang diakibatkan oleh pengaruh perlambatan ekonomi dunia dan dinamika politik di dalam negeri³².

Pengaruh Internet dan Variabel-Variabel Lainnya terhadap Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, persentase rumah tangga yang mengakses internet dan variabel-variabel lainnya diduga dapat meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di masing-masing provinsi di Kawasan Indonesia Barat (KBI). Analisis inferensia yang digunakan di dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persentase rumah tangga yang mengakses internet dan variabel-variabel lainnya terhadap IDI di KBI.

Analisis inferensia yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan regresi linear berganda. Awalnya menentukan variabel bebas dan variabel tidak bebas. Variabel

bebas yang digunakan yaitu persentase rumah tangga yang mengakses internet, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita. Adapun variabel tidak bebas yang digunakan yaitu IDI masing-masing provinsi di KBI. Berikut ini adalah hasil estimasi regresi linear berganda yang terpilih:

Tabel 2. Hasil Estimasi Regresi Linear Berganda

Variabel Bebas	Kawasan Barat Indonesia (KBI)	
	Koefisien	Prob.
(Intersep)	-22,055	0,489
INT	0,527	0,032*
PMK	1,043	0,023*
RLS	-0,519	0,786
lnPP	5,108	0,161
R-squared	0,756	
Uji F	0,027*	

*Pada taraf signifikansi = 5%

Sumber: Hasil pengolahan

Pada Tabel 2 menunjukkan *R-squared* pada model yang digunakan pada penelitian ini menunjukkan nilai sebesar 0,756. Hal ini menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mengakses internet, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita mampu menjelaskan IDI di KBI sebesar 75,6 persen dan sisanya

32 Perda Provinsi Bengkulu, "Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu No 2 Tahun 2020," <https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/2020pd0017002.pdf>.

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan di dalam penelitian ini. Pada uji F juga menunjukkan bahwa persentase rumah tangga yang mengakses internet, persentase penduduk miskin, rata-rata lama sekolah, dan pendapatan per kapita secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap IDI di KBI. Hubungan ini dapat dijelaskan di dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$IDI_i = -22,055 + 0,527 * INT_i + 1,043 * PMK_i - 0,519 RLS_i + 5,108 \ln PP_i \quad (4)$$

Dalam menentukan apakah model tersebut layak digunakan maka diperlukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji homoskedastisitas, dan uji nonmultikolinearitas. Pada Tabel 3 menunjukkan bahwa model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik normalitas. menunjukkan error berdistribusi normal. Berdasarkan hasil pengujian normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov* diperoleh *p-value* sebesar 0,936 yang tidak signifikan terhadap $\alpha = 5$ persen sehingga terjadi gagal tolak. Oleh karena itu, model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik Normalitas

Test	Prob.
Kolmogorov Smirnov	0,936

Sumber: Hasil pengolahan

Pada Tabel 4 menunjukkan bahwa model telah memenuhi uji asumsi klasik homoskedastisitas. Uji asumsi klasik homoskedastisitas yang digunakan di dalam penelitian ini menggunakan uji *Park*. Pada Tabel 3 menunjukkan nilai *p-value* pada masing-masing variabel bebas lebih besar dibandingkan $\alpha = 5$ persen sehingga dapat disimpulkan bahwa model telah memenuhi uji asumsi klasik homoskedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik Homoskedastisitas

Variabel Bebas	Prob.
INT	0,071
PMK	0,080
RLS	0,072
lnPP	0,546

Sumber: Hasil pengolahan

Pada Tabel 5 menunjukkan bahwa model telah memenuhi uji asumsi klasik nonmultikolinearitas. Pada tabel tersebut menunjukkan nilai VIF pada masing-masing variabel bebas memiliki nilai kurang dari 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut telah memenuhi uji asumsi klasik nonmultikolinearitas.

Tabel 5. Hasil Uji Asumsi Klasik Nonmultikolinearitas

Variabel Bebas	VIF
INT	2,653
PMK	2,098
RLS	1,908
lnPP	2,637

Sumber: Hasil pengolahan

Berdasarkan Tabel 2, apabila dilihat secara parsial menunjukkan persentase rumah tangga yang mengakses internet berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDI di KBI. Apabila terjadi peningkatan 1 persen rumah tangga yang mengakses internet maka akan meningkatkan IDI di KBI sebesar 0,527 persen apabila variabel lainnya konstan. Hal ini dikarenakan internet merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sangat familiar dan berperan penting di dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama periode tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan persentase rumah tangga yang mengakses internet selalu mengalami peningkatan di

provinsi-provinsi KBI. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya pengguna telepon seluler dan komputer atau sejenisnya. Dalam meningkatkan pengguna internet, peran aliran listrik juga harus diperhatikan. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), rasio elektrifikasi nasional mencapai 98,89 persen. Rasio elektrifikasi merupakan perbandingan jumlah rumah tangga yang telah memiliki listrik dengan jumlah rumah tangga di Indonesia. Apabila dilihat secara lebih rinci, pada tahun 2019 provinsi-provinsi di KBI yang telah memiliki rasio elektrifikasi sebesar 99 persen yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta. Bahkan Provinsi Bali memiliki rasio elektrifikasi sebesar 100 persen pada tahun 2019.

Dalam hal demokrasi, saat ini internet sangat berperan penting. Berbeda pada masa orde baru yang memiliki aturan pembatasan dalam kebebasan pers. Pada masa orde baru peran media massa dikendalikan oleh pemerintah sehingga masyarakat kesulitan dalam mengontrol kinerja pemerintah dan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui informasi sebenarnya kondisi seperti apa yang sedang terjadi di Indonesia kala itu.

Saat ini kebebasan pers dapat dilakukan di Indonesia. Warga negara memiliki kebebasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan objektif serta hakikatnya merupakan bagian yang penting dari suatu nilai demokrasi³³. Berdasarkan hasil Survei *Reporters Without Borders* tahun 2008 menunjukkan hasil bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua di ASEAN dan menduduki peringkat ke-117 di dunia dalam

33 Anggia Valerisha, "Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2017): 15, <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2546.15-32>.

hal kebebasan pers. Melalui pemberitaannya, pers dapat memberi pencerahan, mencerdaskan, serta meluaskan wawasan kepada pembaca, pendengar, atau pemirsa. Dalam hal politik, pers dapat memberikan pendidikan dalam berpolitik untuk masyarakat serta menyadarkan masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara³⁴.

Fungsi dari media massa atau pers dalam demokrasi meliputi pers atau media sebagai *civic forum*, sebagai pengawas pemerintah atau lembaga-lembaga publik, serta sebagai agen mobilisasi dalam dukungan warga terhadap suatu posisi politis³⁵. Adanya kebebasan pers, media massa sangat berperan penting salah satunya melalui peran penggunaan internet. Internet merupakan jaringan yang dapat mengakses dan menyebarkan informasi di mana dan kapan saja. Oleh karena itu, masyarakat dapat mengontrol kinerja dan kebijakan pemerintah serta mengkritik dari kinerja dan kebijakan tersebut.

Kreativitas-kreativitas pun muncul di kalangan masyarakat dalam memanfaatkan internet. Dalam memanfaatkan internet, masyarakat dapat mengkritik maupun memberikan saran terhadap suatu kebijakan dengan kreativitas. Akhir-akhir ini muncul kreativitas *meme* di laman media sosial.

Meme di dalam internet merupakan bentuk dari replikasi gambar, link, video, maupun lainnya. Namun yang lebih populer di media massa, *meme* dikenal sebagai replikasi gambar yang diberi teks serta bersifat kontekstual sesuai dengan topik yang dimaksud³⁶.

Meme merupakan salah satu bentuk budaya komunikasi baru dalam menyampaikan aspirasi masyarakat dalam waktu yang singkat. Akibatnya, *meme* dapat menjadikan budaya

34 Poti, "Demokratisasi Media Massa," 17-29

35 I Gusti Ngurah Putra, "Demokrasi dan Kinerja Pers Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2013): 131-41, <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.235>.

36 Sandy Allifiansyah, "Kaum Muda, Meme, Dan Demokrasi Digital Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.676>.

di ruang digital. Keberadaan *meme* di media sosial tidak hanya disebabkan oleh pembuat dari *meme* tersebut, namun masyarakat yang tertarik terhadap konten *meme* tersebut, biasanya langsung menyebarkan di media sosial.

Tidak hanya di Indonesia, *meme* juga diminati oleh negara lain. Dalam wacana politik, misalnya salah satu *meme* yang menonjol yaitu #ZodiacTed yang viral ketika pemilu di Amerika Serikat pada tahun 2016. Selain itu, *meme* telah berperan penting di dalam dunia politik India. *Meme* tersebut digunakan sebagai media untuk mengkomunikasikan pandangan tentang isu, orang, dan partai politik³⁷.

Pembuatan *meme* banyak diminati oleh kalangan anak muda. Hal ini menunjukkan banyak pengguna internet dari kalangan anak muda dalam mengakses media sosial. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk usia 5 tahun ke atas yang mengakses internet dalam 3 bulan terakhir pada tahun 2019, sebanyak 87,20 persen digunakan untuk mengakses media sosial, sebanyak 69,90 persen digunakan untuk mendapat informasi/berita, sebanyak 62,13 persen digunakan untuk hiburan, sebanyak 25,86 persen digunakan untuk mengerjakan tugas sekolah, sebanyak 13,94 persen digunakan untuk mengirim atau menerima E-mail, sebanyak 12,83 persen digunakan untuk pembelian barang/jasa, sebanyak 6,46 persen untuk fasilitas finansial, sebanyak 3,25 persen untuk keperluan lainnya.

Selain melalui *meme*, masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui tulisan. Saat ini, banyak media yang menyediakan laman untuk menulis, baik di dalam blog pribadi, media sosial, maupun website resmi. Tidak hanya dapat menuliskan aspirasi bahkan

di website-website tertentu masyarakat memperoleh honor ketika opini yang ditulis dimuat di website-website tersebut.

Penulisan opini tidak hanya berlaku bagi orang dewasa. Namun, para pelajar dapat menyampaikan aspirasinya melalui tulisan. Oleh karena itu, para pelajar pun dapat belajar mengenai demokrasi di Indonesia. Selain itu, didukung pula usia para pelajar, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang baru berusia 17 tahun dan memulai berpartisipasi dalam pemilihan umum.

Generasi muda memiliki peran penting di dalam tegaknya demokrasi di negeri ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajak generasi muda untuk mengawal tegaknya demokrasi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Bawaslu menyadari bahwa demokrasi tidak akan sempurna apabila tidak terdapat keterlibatan peran generasi muda. Oleh karena itu, Bawaslu membuka program Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi generasi muda dan pemilih pemula dalam pengawasan Pemilu dan Pilkada³⁸.

Kemudian dalam pemilu yang diadakan pada 17 April 2019 terjadi peningkatan partisipasi masyarakat dalam memilih. Misalnya, partisipasi masyarakat di Provinsi Bali pada pemilu tahun 2019 mengalami peningkatan. Partisipasi masyarakat dalam pemilu serentak tahun 2019 mencapai 80 persen ke atas. Adapun pada Pilkada tahun 2018 partisipasi pemilih hanya mencapai 71,8 persen³⁹. Hal ini sejalan dengan IDI yang juga semakin tinggi. Adapun Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan presiden tahun 2019 berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU) paling banyak berada di Provinsi Jawa Barat sebanyak 33 juta individu.

37 Anushka Kulkarni, "Internet Meme and Political Discourse: A Study on the Impact of Internet Meme as a Tool in Communicating Political Satire," *Journal of Content, Community and Communication* 6, no. December 2017 (2017): 13-17, <https://doi.org/10.2139/ssrn.3501366>.

38 Bawaslu Grobogan, "Bagaimanakah Peran Pemuda Dalam Demokrasi Bangsa?," 2020, <https://grobogan.bawaslu.go.id/bagaimanakah-peran-pemuda-dalam-demokrasi-bangsa.html>.

39 Suka Arjawa, Gede Kamajaya, Penny Kurnia Putri, "Laporan Riset Kepemiluan 2019 Partisipasi Pemilih Provinsi Bali," 2019.

Kemudian provinsi lain yang memiliki jumlah pemilih lebih dari 10 juta berada di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki jumlah masing-masing sebesar 30,9 juta individu dan 27,8 juta individu⁴⁰.

Partisipasi masyarakat dalam memilih mengalami peningkatan disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, media sosial yang berperan dalam membentuk opini masyarakat. Peran media sosial tersebut didukung oleh pengguna akses internet. Pengguna media sosial di Indonesia mencapai 49 persen populasi dari pengguna internet di Indonesia. Akibatnya, membawa persaingan baru dalam partai politik dan kandidat Pilkada serentak tahun 2018 serta pemilu serentak tahun 2019. Kedua, adanya tingkat kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi yang baik, kepercayaan terhadap pemerintah, penyelenggara pemilu, peserta pemilu, partai politik, calon legislatif, serta calon perwakilan daerah. Ketiga, daya pikat dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden terutama bagi generasi milenial sangat menentukan dalam meningkatkan grafik dari angka pemilih⁴¹.

Selain persentase rumah tangga yang mengakses internet, persentase penduduk miskin berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IDI di KBI. Berdasarkan Tabel 1, apabila terjadi peningkatan 1 persen persentase penduduk miskin maka akan meningkatkan IDI di KBI sebesar 1,043 persen apabila variabel lainnya konstan.

Penggunaan Internet dalam Menunjang Perkembangan Demokrasi

Salah satu syarat mutlak upaya demokratisasi adalah jaminan terhadap

40 Databoks.katadata.co.id, "Jumlah Pemilih Pilpres 2019 Total 190 Juta," 2019, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/16/jumlah-pemilih-pilpres-2019-total-190-juta>.

41 Mohammad Mulyadi, "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019," *Info Singkat IX*, no. 09 (2019), https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-9-IP3DI-Mei-2019-192.pdf.

kebebasan pers. Pers dianggap sebagai pilar demokrasi keempat setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif⁴². Fungsi dari media masa atau pers dalam demokrasi meliputi pers atau media sebagai *civic forum*, sebagai pengawas pemerintah atau lembaga-lembaga publik (*watch dog function*), serta sebagai agen mobilisasi dalam dukungan warga terhadap suatu posisi politis⁴³. Sebagai *civic forum*, media massa atau pers harus berfungsi pada tingkat yang umum sebagai saluran bagi pemerintah dan yang diperintah untuk berkomunikasi secara efektif. Media massa bertindak sebagai penghubung penting yang menghubungkan secara horizontal para politisi dan secara vertikal antara aktor-aktor politik dengan para pemilih atau warga negara biasa. Dalam hal ini tercakup juga mengenai media sebagai pembentuk opini publik⁴⁴.

Media massa diharapkan dan yang diandalkan dapat berperan sebagai pengawas (*watch dog function*) untuk mengungkap kebenaran dan kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan atau yang memiliki kekuasaan⁴⁵. Dalam hal ini media berfungsi untuk mengawasi mereka yang memiliki kekuasaan baik dalam bidang politik (pemerintah), organisasi nirlaba maupun dalam sektor swasta (termasuk perusahaan atau pemilik media). Ini dilakukan agar mereka bertanggungjawab terhadap segala tindakan mereka⁴⁶.

Kemudian, media berperan sebagai agen mobilisasi dalam dukungan warga terhadap suatu posisi politis. Hal ini berarti media massa merupakan sarana meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Media massa atau pers dikatakan sukses bila media mampu mendorong

42 Astrid Susanto, *Filsafat Komunikasi* (Bandung: Bina Cipta, 1976).

43 Pippa Norris, *A Virtuous Circle: Political Communications In PostIndustrial Societies* (New York: Cambridge University Press, 2000).

44 Putra, "Demokrasi Dan Kinerja Pers Indonesia, 131-41.

45 Poti, "Demokratisasi Media Massa," 17-29.

46 Valerisha, "Dampak Praktik Konglomerasi Media", 15-32.

warga negara belajar tentang politik dan permasalahan publik/bersama sehingga warga negara dapat menentukan pilihan-pilihan politik mereka secara lebih cerdas dan rasional⁴⁷. Melalui lembaga pers, masyarakat dapat melakukan kritik dan koreksi terhadap realitas sosial politik yang sedang berlangsung sekaligus sebagai manifestasi dari kebebasan berpendapat dan berpikir yang merupakan hak dasar manusia baik sebagai makhluk individu maupun sosial⁴⁸.

Dikaitkan dengan kehidupan politik, media massa harus mampu menyajikan informasi tentang berbagai isu publik bagi setiap warga negara, sehingga mereka dapat menentukan pilihan-pilihan dan dukungan politis yang dibuatnya secara memadai. Warga negara dapat menentukan pilihannya berdasarkan informasi yang tersedia⁴⁹. Warga negara memiliki kebebasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan objektif serta hakikatnya merupakan bagian yang penting dari suatu nilai demokrasi⁵⁰. Artinya, kebebasan pers juga tidak hanya berarti kebebasan satu arah dari pihak media atau peran pers saja, namun menjamin keterlibatan masyarakat untuk menggunakan hak-hak sebagai warga negara apabila merasa dirugikan oleh pers⁵¹. Sehingga media massa berperan penting dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam agenda publik serta menumbuhkan kesadaran dan pemahaman dari persoalan publik hingga persoalan politik. Oleh karena itu, peran media massa terutama internet dapat menunjang perkembangan demokrasi di negeri ini.

Pengaruh Variabel Lainnya terhadap Perkembangan Demokrasi

Partisipasi pemilih merupakan salah satu unsur yang penting di dalam pemilihan umum. Masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dalam memilih calon pemimpin yang akan menjadi pemimpin di suatu wilayah pada periode berikutnya dan tidak dalam waktu yang singkat. Tanpa adanya partisipasi masyarakat miskin dalam pemilihan umum menunjukkan sistem demokrasi yang tidak baik.

Pada masa kampanye, para calon pemimpin melakukan agenda blusukan. Para calon pemimpin tersebut menyapa masyarakat miskin dan memberitakan visi dan misi yang dimilikinya jika terpilih nanti. Dalam masa blusukan tersebut, masyarakat miskin merasa diri mereka dihargai dan saran didengar. Akibatnya, masyarakat tertarik untuk berpartisipasi di dalam pemilu.

Tidak hanya peran dari calon pemimpin yang melakukan agenda blusukan sehingga masyarakat miskin tertarik untuk mengikuti pemilu. Namun, partisipasi masyarakat miskin dalam mengikuti pemilu disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi politik dari masyarakat miskin kota dalam pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 yang berlokasi di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Faktor-faktor tersebut terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat⁵².

Faktor pendukung meliputi faktor kesadaran atau kemauan dan faktor pengaruh pemerintah. Faktor kesadaran atau kemauan yang dimaksud adalah kesadaran diri dari masyarakat miskin dalam berpartisipasi di pemilu tanpa adanya paksaan dari pihak

47 Valerisha, "Dampak Praktik Konglomerasi Media", 15-32.

48 Siti Murtiningsih; Joko Siswanto, "Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis Atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru)," Filsafat, 1999, 57-65.

49 Putra, "Demokrasi Dan Kinerja Pers Indonesia, 131-41.

50 Valerisha, "Dampak Praktik Konglomerasi Media", 15-32

51 Poti, "Demokratisasi Media Massa," 17-29.

52 Andi Nur Amaliah, Muhajirah Hasanuddin, Alimuddin Said., "Partisipasi Politik Masyarakat Miskin Kota Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden 2014 di Kota Makassar." *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5, no. 1 (April, 2015), 12-26.

lain. Adapun faktor pengaruh pemerintah yang dimaksud yaitu adanya pengaruh dari pemerintah setempat agar masyarakat miskin dapat berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemilu.

Selain faktor pendukung, juga terdapat faktor penghambat masyarakat miskin dalam berpartisipasi di dalam pelaksanaan pemilu. Faktor penghambat tersebut meliputi faktor lingkungan dan faktor ekonomi. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah pengaruh lingkungan sekitar seperti dari keluarga atau rekan sejawat. Ajakan keluarga atau rekan sejawat dapat berpengaruh dalam berpartisipasi atau tidaknya masyarakat dalam pemilu. Adapun faktor ekonomi yang dimaksud yaitu karena kondisi perekonomian yang tidak baik sehingga sebagian besar masyarakat miskin lebih memilih bekerja dibandingkan mengikuti pemilu.

Namun keterlibatan masyarakat miskin dalam pemilu harus diperhatikan. Adanya *money politic* dapat berdampak buruk terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia. *Money politic* dapat diartikan dengan suatu pemberian yang bersifat memaksa yang memiliki tujuan untuk membujuk masyarakat tertentu dalam memilih seseorang atau sepasang calon pemimpin di wilayah tersebut. Pemberian tersebut dapat berwujud uang atau barang-barang yang menarik. Kasus *money politic* sangat rawan terjadi di lingkungan masyarakat miskin.

Keadaan ekonomi yang terbatas membuat masyarakat miskin tidak berpikir panjang mengenai dampak buruk dari *money politic*. Sebagian dari masyarakat miskin menganggap kebutuhan saat ini lebih penting daripada kebutuhan di masa yang akan datang. Hal ini dikarenakan masih ditemukan masyarakat miskin yang kesulitan dalam mencari makan, pengobatan, maupun membiayai anak sekolah.

Dalam mencegah pelaksanaan *money politic* perlu melibatkan berbagai pihak. Misalnya adanya upaya untuk mewujudkan masyarakat anti *money politic* di Provinsi Kepulauan Riau, terutama di Kabupaten Bintan. Pada pemilu tahun 2019 persentase partisipasi pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu tersebut adalah sebesar di atas rata-rata 70 persen dan angka tersebut telah memenuhi target. Upaya untuk mewujudkan masyarakat anti *money politic* dilakukan di wilayah masyarakat pesisir. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di wilayah pesisiran berprofesi sebagai nelayan. Membicarakan nelayan, biasanya diidentikkan dengan kondisi keluarga yang miskin dan memiliki jenjang pendidikan yang rendah. Akibatnya, perlu dilakukan pengawasan yang dilakukan tidak hanya oleh Badan Pengawas Pemilu, namun juga dibantu oleh pihak lainnya⁵³.

Upaya dalam menumbuhkan sikap anti politik uang pada pilkada tahun 2020 yaitu (1) Menumbuhkan interaksi antar masyarakat di dalam forum-forum maupun acara-acara yang melibatkan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dalam memberi kesadaran bahwa politik uang merupakan perbuatan yang tidak baik; (2) Membuat zona desa anti politik uang yang dijadikan identitas desa-desa di wilayah pesisir; (3) Saling kerja sama antar pemerintah, BPD, dan masyarakat; (4) Menambahkan nilai-nilai pendidikan anti politik uang di acara adat istiadat⁵⁴.

Selain berpartisipasi di dalam pemilu, masyarakat miskin melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasinya mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, terutama di kota-kota besar. Aksi masyarakat miskin tersebut biasanya juga didampingi

53 Moh. Ismail Wisuda, "Masyarakat di Wilayah Pesisir Dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Anti Money Politic," 2021, <https://bintankab.bawaslu.go.id/masyarakat-di-wilayah-pesisir-dalam-upaya-mewujudkan-masyarakat-anti-money-politic/>.

54 Wisuda, "Masyarakat di Wilayah Pesisir."

oleh sekelompok mahasiswa serta kelompok-kelompok masyarakat lainnya. Demokrasi harus dapat mengangkat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat dijadikan jalan bagi masyarakat dalam mencapai kemakmuran dan kebahagiaan baik jasmani maupun rohani⁵⁵.

Kemudian, pada penelitian ini variabel rata-rata lama sekolah tidak berpengaruh signifikan terhadap IDI di KBI. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan tidak selalu membuat masyarakat berpartisipasi di dalam kehidupan demokrasi. Terdapat sebagian masyarakat yang berpendidikan tinggi namun tidak terlalu mempedulikan kondisi politik di negeri ini. Akibat adanya kesibukan di lingkungan pekerjaan sehingga masyarakat tersebut lebih memilih bekerja dibandingkan menggunakan hak pilihnya di pemilu. Selain itu, adanya janji politik ketika masa kampanye juga menunjukkan hanya sekedar janji namun tidak selamanya diwujudkan sehingga membuat masyarakat kecewa.

Terjadi hubungan yang sangat rendah antara tingkat pendidikan pemilih pemula terhadap partisipasi politik di dalam Pemilihan Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Kecamatan Cakung, Jakarta Timur⁵⁶. Kemudian mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik dalam pemilihan langsung kepada desa di Kecamatan Singkil Utara menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak memengaruhi partisipasi. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat bersikap apatis serta tidak ingin terlibat di dalam proses politik⁵⁷.

55 Heri Kusmanto, "Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik," *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA* (Journal of Governance and Political Social UMA) 2, no. 1 (2014): 77-89, <https://doi.org/article/8f84c9b4e5474466a345d1a1ba5270ab>.

56 Bornadus Asa Abednego, "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 di Kecamatan Cakung Jakarta Timur," *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 04 (2019): 111-120.

57 Lidya, "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Langsung Kepala Desa Kecamatan Singkil Utara" (Banda Aceh, 2018).

Berkaitan dengan kondisi pembangunan suatu negara yang diproksi menggunakan variabel pendapatan per kapita, variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap IDI di KBI. Pendapatan per kapita suatu wilayah dapat dijadikan ukuran kasar dalam menentukan tingkat kemakmuran bagi penduduknya. Pendapatan per kapita adalah pendapatan dari rata-rata penduduk di suatu negara pada waktu tertentu⁵⁸.

Pada kenyataannya hasil dari proses pembangunan belum dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar yang merasakan dampaknya yaitu hanya kalangan masyarakat kota dan memiliki status sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak ditemukan masyarakat miskin yang tidak sejahtera yang tinggal di wilayah perkotaan. Akibatnya, hasil dari pembangunan tidak dapat mewujudkan demokrasi di negeri ini dengan baik. Kegagalan dari pembangunan yang terjadi selama sejarah berlangsung menunjukkan tidak berhasilnya dalam menciptakan negara demokratis namun menghasilkan negara yang korupsi⁵⁹.

Sebagian dari masyarakat tersebut berpikir bahwa pemilu merupakan kegiatan yang hanya sekedar formalitas sehingga mengakibatkan masyarakat tersebut tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam mendukung dan mewujudkan negara demokratis di negeri ini. Hal ini merupakan akibat dari melihat hasil pembangunan yang belum dirasakan oleh semua pihak. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah perwujudan dari nilai demokrasi⁶⁰. Oleh karena itu, pembangunan dapat dijadikan pendorong nilai-nilai demokrasi sehingga dapat berkembang di negeri ini.

58 Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

59 Siti Witianti, "Demokrasi dan Pembangunan," *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 1 (2016): 71-76, <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547>.

60 Witianti, "Demokrasi dan Pembangunan," 71-76.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan (1) Persentase rumah tangga yang mengakses internet dan persentase penduduk miskin berpengaruh positif dan signifikan terhadap IDI di KBI dengan tingkat signifikansi = 5 persen. Dalam hal demokrasi, saat ini internet sangat berperan penting. Berbeda pada masa orde baru yang memiliki aturan pembatasan dalam kebebasan pers. Pada masa orde baru peran media massa dikendalikan oleh pemerintah sehingga masyarakat kesulitan dalam mengontrol kinerja pemerintah dan tidak dapat mengkritik kinerja pemerintah. Akibatnya, masyarakat kurang mengetahui informasi sebenarnya kondisi seperti apa yang sedang terjadi di Indonesia kala itu. Saat ini kebebasan pers dapat dilakukan di Indonesia, terutama melalui peran internet. Warga negara memiliki kebebasan dalam memperoleh dan menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan objektif serta hakikatnya merupakan bagian yang penting dari suatu nilai demokrasi. Oleh karena itu, peran media massa terutama internet dapat menunjang perkembangan demokrasi di negeri ini, terutama di KBI;(2) Variabel-variabel bebas yang digunakan di dalam penelitian ini mampu menggambarkan IDI di KBI.

Berdasarkan kesimpulan maka penulis menyarankan sebaiknya pemerintah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mendukung dan meningkatkan pengguna internet di KBI. Melalui berbagai langkah seperti meningkatkan pembangunan infrastruktur, pelatihan, dan sebagainya. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi mengenai demokrasi sehingga masyarakat turut aktif dalam berdemokrasi di negeri ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abednego, Bornadus Asa, and Lusia Astrika. "Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Tingkat Ekonomi terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 di Kecamatan Cakung Jakarta Timur." *Journal of Politic and Government Studies* 8, no. 04 (2019): 111-120.
- Alatas, Salim. "Media Baru, Partisipasi Politik Dan Kualitas Demokrasi," 2014. Makalah. Dipresentasikan dalam Konferensi Nasional Komunikasi.
- Allifiansyah, Sandy. "Kaum Muda, Meme, dan Demokrasi Digital di Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2017): 151. <https://doi.org/10.24002/jik.v13i2.676>.
- Arjawa, Suka., Kamajaya, Gede., Putri, Penny K. "Laporan Riset Kepemiluan 2019 Partisipasi Pemilih Provinsi Bali," 2019.
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara. "Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumatera Utara 2019 Naik 3,32 Poin," 2020. <https://sumut.bps.go.id/pressrelease/2020/08/03/730/indeks-demokrasi-indonesia-idi-sumatera-utara-2019-naik-3-32-poin.html>.
- Bawaslu Grobogan, "Bagaimanakah Peran Pemuda Dalam Demokrasi Bangsa?," Bawaslu Grobogan, Diakses 24 Januari 2021 <https://grobogan.bawaslu.go.id/bagaimanakah-peran-pemuda-dalam-demokrasi-bangsa.html>.
- Blumler, Stephen Coleman; Jay G. *The Internet and Democratic Citizenship; Theory, Practice and Policy*. New York: Cambridge University Press, 2004.

- CNN Indonesia, "Raih Indeks Tertinggi, Anies Anggap Demokrasi di DKI Matang", CNN Indonesia, CNN Indonesia, Diakses 18 Januari 2021 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213132746-32-353373/raih-indeks-tertinggi-anies-anggap-demokrasi-di-dki-matang>.
- Dahl, Robert A. *Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press, 1997.
- databoks.katadata.co.id, "Jumlah Pemilih Pilpres 2019 Total 190 Juta", databoks.katadata.co.id, Diakses 26 Januari 2021 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/16/jumlah-pemilih-pilpres-2019-total-190-juta>. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Survei Penggunaan TIK Di DKI Jakarta 2019. Jakarta: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, 2019.
- Fatah, Zainal, and Megasari Noer Fatanti. "Mempolitisasi Ruang Virtual: Posisi Warga-Net Dalam Praktik Demokrasi Digital di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 3, no. 1 (2019): 306. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v3i1.1459>.
- Gotlieb, C. C. "Does the Internet Promote Democracy?," 2002, 21-29. https://doi.org/10.1007/978-0-387-35609-9_2.
- Harjono. "Negara Hukum, Demokrasi Dan Makamah Konstitusi." *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 2010. https://doi.org/10.1007/978-1-137-07249-8_8.
- Harususilo, Yohanes Enggar, "Anies Dorong Program "Pendidikan Berkualitas dan Tuntas 100 Persen", edukasi.kompas.com, diakses 19 Januari 2021, <https://edukasi.kompas.com/read/2019/03/19/18472651/anies-dorong-program-pendidikan-berkualitas-dan-tuntas-100-persen>.
- Jatmiko, Leo Dwi, "Setengah Penduduk di Provinsi Ini Buta Internet", diakses 31 Januari 2021 <https://teknologi.bisnis.com/read/20190521/101/925206/setengah-penduduk-di-provinsi-ini-buta-internet>.
- Juniarto, Damar, "Mempertimbangkan Internet Dalam Gerakan Demokrasi di Indonesia", politik.lipi.go.id, Diakses 22 Januari 2021 <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1085-mempertimbangkan-internet-dalam-gerakan-demokrasi-di-indonesia>.
- Kulkarni, Anushka. "Internet Meme and Political Discourse: A Study on the Impact of Internet Meme as a Tool in Communicating Political Satire." *Journal of Content, Community and Communication* 6, no. December 2017 (2017): 13-17. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3501366>.
- Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi." *Inovatif VIII*, no. 2 (2015): 95-114.
- Kusmanto, Heri. "Partisipasi Masyarakat Dalam Demokrasi Politik." *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)* 2, no. 1 (2014): 77-89. <https://doaj.org/article/8f84c9b4e5474466a345d1a1ba5270ab>.
- Lidya. "Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Dalam Pemilihan Langsung Kepala Desa Kecamatan Singkil Utara." Banda Aceh, 2018.
- Mulyadi, Mohammad. "Membangun Demokrasi Dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Memilih Pada Pemilu 2019." *Info Singkat IX*, no. 09 (2019). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XI-9-I-P3DI-Mei-2019-192.pdf.

- Neter, John, Michael H. Kutner, Christopher J. Nachtsheim, and William Wasserman. *Applied Linear Statistical Models*. McGraw: Hill/Irwin series Operations and decision sciences, 1996.
- Nisa, Khoirun, "Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta Menurun", statistik.jakarta.go.id, Diakses 19 Januari 2021 <http://statistik.jakarta.go.id/persentase-penduduk-miskin-di-provinsi-dki-jakarta-menurun/>.
- Norris, Pippa. *A Virtuous Circle: Political Communications In PostIndustrial Societies*. New York: Cambridge University Press, 2000.
- Perda Provinsi Bengkulu, Diakses 19 Januari 2021 <https://jdih.bengkuluprov.go.id/assets/backend/dist/produk/2020pd0017002.pdf>.
- Poti, Jamhur. "Demokratisasi Media Massa Dalam Prinsip Kebebasan." *Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan* 1, no. 1 (2011): 17-29. <http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/JURNAL-ILMU-PEMERINTAHAN-BARU-KOREKSI-last.23-35.pdf>.
- Putra, I Gusti Ngunah. "Demokrasi Dan Kinerja Pers Indonesia." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2013): 131-41. <https://doi.org/10.24002/jik.v3i2.235>.
- radarsemarang.jawapos.com, "Anggaran Pendidikan masih Timpang", radarsemarang.jawapos.com, diakses 19 Januari 2021 <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/semarang/2019/09/11/anggaran-pendidikan-masih-timpang/>.
- Rauf, Maswadi; dkk. *Menakar Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: United Nations Development Programme, Indonesia, 2011. <http://ditpolkom.bappenas.go.id/v2/wp-content/uploads/2018/12/Buku-IDI-2009.pdf>.
- Siswanto, Siti Murtiningsih; Joko. "Pembungkaman Pers Pada Masa Orde Baru (Refleksi Filosofis Atas Kebebasan Pers Indonesia Masa Orde Baru)." *Filsafat*, 1999, 57-65.
- Situmorang, James R. "Pemanfaatan Internet Sebagai New Media Dalam Bidang Politik, Bisnis, Pendidikan Dan Sosial Budaya." *Jurnal Administrasi Bisnis* 8, no. 1 (2012): 77-91. <https://doi.org/10.26593/jab.v8i1.418>.
- Sukirno, Sadono. *Makroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susanto, Astrid. *Filsafat Komunikasi*. Bandung: Bina Cipta, 1976.
- Taufiq, Nuri, "Fakta-Fakta Seputar Aceh sebagai Provinsi Termiskin di Sumatera", Diakses 19 Januari 2021 <https://news.detik.com/kolom/d-4877496/fakta-fakta-seputar-aceh-sebagai-provinsi-termiskin-di-sumatera>.
- Valerisha, Anggia. "Dampak Praktik Konglomerasi Media Terhadap Pencapaian Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 12, no. 1 (2017): 15. <https://doi.org/10.26593/jihi.v12i1.2546.15-32>.
- Wisuda, Moh. Ismail, "Masyarakat di Wilayah Pesisir dalam Upaya Mewujudkan Masyarakat Anti Money Politic", bintankab.bawaslu.go.id, diakses 28 Januari 2021, <https://bintankab.bawaslu.go.id/masyarakat-di-wilayah-pesisir-dalam-upaya-mewujudkan-masyarakat-anti-money-politic/>.
- Witianti, Siti. "Demokrasi dan Pembangunan." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 1 (2016): 71-76. <https://doi.org/10.24198/jwp.v1i1.10547>.

Yuliati, Reny. "Penggunaan Internet Terhadap Peningkatan Partisipasi Politik Dan Kehidupan Demokrasi." *Bricolage: Jurnal Magister Ilmu Komunikasi* 2, no. 02 (2017): 124-29. <https://doi.org/10.30813/bricolage.v2i02.840>.